

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertahanan negara merupakan salah satu aspek penting untuk menjamin eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pertahanan negara yang kokoh akan mampu mewujudkan bangsa yang kuat. Masalah pertahanan yang berhubungan dengan upaya menghadapi ancaman dari luar masih tetap penting tidak kalah penting dengan permasalahan ekonomi. Setiap negara di dunia terus-menerus meningkatkan pertahanan negaranya, baik dengan pendekatan militer maupun nonmiliter.

Setiap negara berhak untuk memiliki kebijakannya masing-masing, termasuk dalam memilih kebijakan pertahanan negara. Kebijakan yang dibuat harus disesuaikan dengan kemampuan negara dalam memberikan dukungannya terhadap kebijakan pertahanan yang diambil. Sistem pertahanan yang diterapkan oleh negara didasari oleh beberapa faktor, seperti letak geografis negara, politik luar negeri, dan sebagainya. Sedangkan alat yang digunakan untuk merealisasikan sistem pertahanan adalah militer.

Pertahanan Negara merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menjaga eksistensi dan keberlangsungan hidup suatu bangsa. Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan.¹ Pertahanan Negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang dilaksanakan melalui Sistem pertahanan rakyat semesta, yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan

¹ Republik Indonesia, Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: KEP/1255/M/XII/2015 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016, (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015)

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.²

Diplomasi pertahanan telah dilaksanakan oleh Indonesia sejak puluhan tahun silam dan terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Peningkatan diplomasi pertahanan dalam satu dekade terakhir sangat dipengaruhi oleh menguatnya kerjasama pertahanan antar negara guna merespon ancaman dan tantangan yang bersifat multidimensi, termasuk ancaman non tradisional. Namun disayangkan, perkembangan demikian belum diikuti oleh kegiatan evaluasi kebijakan diplomasi pertahanan Indonesia. Pada masa silam, kegiatan diplomasi pertahanan terkesan hanya sebagai pelengkap diplomasi Indonesia saja. Akan tetapi dalam kondisi dunia yang kekinian, diplomasi pertahanan telah memainkan peran yang jauh lebih besar dan tidak bisa lagi dipandang sebagai pelengkap belaka. Karena diplomasi pertahanan adalah bagian tidak terpisahkan dari diplomasi Indonesia secara keseluruhan.

Indonesia saat ini tengah berupaya untuk membangkitkan kembali industri pertahanan nasional yang mengalami kemunduran akibat krisis ekonomi 1997. Untuk itu, Indonesia terus berupaya menjalin kerjasama industri pertahanan dengan negara-negara yang sudah lebih dahulu maju di bidang ini. Kerjasama yang diharapkan akan berkuat pada alih teknologi belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena kendala kebijakan maupun kesiapan teknis industri pertahanan. Yaitu, pada kerjasama tingkat kementerian pertahanan dan kerjasama bilateral pertahanan. Hampir seluruh bidang kerjasama mengenai aspek negara seperti ekonomi, komunikasi, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, hingga kerjasama pertahanan dan militer dalam bentuk kerjasama di bidang industri alutsista.

² Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 97 tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2015-2019, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 200, 2015)

Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan Jepang adalah kerjasama pertahanan. Kerjasama pertahanan merupakan kerjasama yang menitik beratkan pada kepentingan nasional suatu negara, karena kerjasama ini memiliki sifat yang sensitif karena menyangkut kedaulatan, keamanan, kestabilan dan kesejahteraan rakyat. Mengacu pada diplomasi pertahanan Indonesia, terdapat sejumlah masalah yang dihadapi oleh diplomasi pertahanan saat ini. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dalam melaksanakan diplomasi, bukan saja terkait dengan kemampuan penguasaan bahasa asing, tetapi mencakup pula bekal-bekal akademis dan pengetahuan-pengetahuan lainnya untuk mendukung tercapainya tujuan diplomasi pertahanan. Akibatnya, seringkali Indonesia berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam diplomasi pertahanan karena masalah kualitas sumberdaya manusia tersebut. Disamping itu dengan adanya penurunan terhadap kualitas sumber daya manusia, berakibat masih adanya pandangan yang kurang tepat terhadap kerjasama pertahanan. Pandangan yang tidak tepat, bahkan alergi, terhadap kerjasama pertahanan multilateral masih kuat di Indonesia. Akibatnya Indonesia kesulitan untuk mengusulkan pengembangan-pengembangan baru dalam kerjasama pertahanan.

Dalam kesepakatan baru, Indonesia-Jepang berencana membentuk program pelatihan bersama dan pertukaran teknologi militer. Saat ini kedua negara hanya melakukan pertukaran pelajar sekolah militer. Pemerintah tidak hanya akan memperkuat kerja sama dengan Jepang. Meskipun kesepakatan militer Indonesia-Jepang tidak mengikat. Indonesia-Jepang ingin memperkuat hubungan pertahanan. Fakta pertahanan yang kemungkinan besar akan disepakati disebut sangat signifikan untuk kedua negara. Bagi Jepang, hubungan militer yang lebih erat dengan Indonesia bisa membuka

peluang yang lebih baik bagi perusahaan peralatan militer Jepang.

Kebijakan pertahanan Indonesia pada era Presiden Joko Widodo saat ini memiliki empat prioritas utama, yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan pertahanan, baik yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit, maupun penyediaan alutsista; mendukung kemandirian pertahanan agar mampu menghindari ketergantungan pada pasokan produk impor; membangun TNI sebagai sebuah kekuatan yang disegani; dan menempatkan kegiatan pertahanan keamanan negara sebagai bagian integral dari pendekatan keamanan yang komprehensif.³ Apalagi fokus utama Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo adalah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Jepang dan Indonesia berbagi predikat sebagai sama-sama negara kepulauan, sebagai sesama negara maritim, bagi Jepang dan Indonesia kerja sama di bidang kemaritiman adalah prioritas paling utama dalam kerja sama antar kedua negara. Untuk itu, Indonesia dan Jepang akan secara aktif mendorong kerja sama di bidang keamanan laut. Dari sisi jumlah, pulau-pulau di Jepang hampir mencapai 7.000km² dengan luas lautan sekitar 4 juta kilometer persegi (km²). Dibandingkan dengan Indonesia, Jepang jelas 'tidak ada apa-apanya'. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan luas lautan lebih dari 5 juta km². Namun, Jepang sudah lama melebihi Indonesia dalam berbagai sektor yang berhubungan dengan maritim, seperti pelayaran, pelabuhan, dan lainnya. Jepang sudah bertransformasi menjadi maritime power sementara Indonesia masih bertahan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Sehingga posisi Indonesia yang strategis justru menimbulkan permasalahan. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi Indonesia ini berupa ancaman militer maupun non militer seperti terorisme, pencurian

³ Resty Armenia, Presiden Jokowi Beberkan Empat Kebijakan Pertahanan Prioritas, CNN Indonesia, 31 Desember 2014. Tersedia di [Diakses 1 Maret 2018].

sumber daya alam, pelanggaran batas wilayah, pembajakan baik di laut maupun udara, bencana alam, narkoba, spionase, cyber war, proxy war, penyelundupan, imigran gelap, wabah penyakit, konflik terbuka atau perang konvensional, dan kriminal lintas batas lainnya. Program modernisasi militer Indonesia ini telah membawa perubahan berarti bagi pertahanan militer Indonesia. Dengan banyaknya penambahan alutsista, kemampuan tempur TNI meningkat secara signifikan. Bahkan pemerintah melalui Kementerian Pertahanan berencana menjadikan militer Indonesia sebagai yang terbesar di Asia Tenggara mengingat pada tahun 2014 ini sejumlah alutsista milik tiga matra (TNI AD, AL, dan AU) semakin membaik kualitas dan kuantitasnya.

Kerjasama pertahanan yang dilaksanakan oleh Indonesia mencakup kerjasama di bidang operasi dan latihan. Untuk jenis kerjasama ini, keterlibatan TNI merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Namun karena keterbatasan kemampuan unsur alutsista TNI yang dalam kondisi siap operasi dan bertempur, maka kegiatan-kegiatan kerjasama di bidang operasi dan latihan dengan negara-negara lain belum optimal. Tidak jarang suatu unsur alutsista TNI yang tengah dalam kondisi siap operasi dan bertempur harus terlibat dalam rangkaian kegiatan operasi dan latihan dengan beberapa negara mitra secara berurutan. Terbatasnya kemampuan alutsista juga mempengaruhi uji kemampuan alutsista dengan berbagai macam skenario dalam latihan bersama dengan negara-negara lain. Hal lainnya yang juga terpengaruh adalah terbatasnya kesempatan bagi personel TNI untuk menguji kemampuan alutsista secara optimal karena keterbatasan kemampuan alutsista tersebut.

Dalam hal sektor ekonomi dan perdagangan, Jepang memiliki keunggulan yang sangat menguntungkan bagi Indonesia. Ekspor nonmigas Indonesia ke Jepang menduduki peringkat ke-3 setelah ekspor ke Amerika Serikat dan Tiongkok. Bila ditilik angkanya, berdasar data

Bank Indonesia tahun 2015, pangsa pasar ke Jepang adalah 9,9 persen. Berbeda sedikit dengan pasar ekspor ke AS sebesar 11,6 persen dan Tiongkok 10 persen. Sementara bagi Indonesia, Jepang merupakan salah satu negara yang wisatawanannya banyak berkunjung ke Indonesia, bersama dengan negara Singapura, Australia, Malaysia, dan Tiongkok. Serta angka investasi Jepang di Indonesia sendiri terbilang menggembirakan. Di tengah kelesuan ekonomi global, Jepang justru mencatatkan peningkatan investasi yang sangat signifikan di Indonesia. Di tengah belum membaiknya perekonomian global, telah tercatat peningkatan investasi Jepang yang sangat signifikan. Dari Januari hingga September 2016 investasi Jepang telah mencapai angka USD 4,498 miliar dan angka ini meningkat hampir dua kali lipat dibanding tahun 2015. Jepang merupakan pasar ekspor ke-3 Indonesia, di sisi lain juga merupakan investor kedua terbesar di Indonesia, khususnya di sektor infrastruktur. Keuntungan yang didapat Indonesia dan Jepang dari kerjasama ekonomi yang dilakukan keduanya yaitu, mempererat persahabatan negara, menambah kemakmuran negara, menambah kesempatan kerja, dan mendorong kemajuan teknologi.

Dalam bidang teknologi dan transportasi tidak luput dari diadakannya kerjasama ini. kerjasama Indonesia dengan Jepang yang membangun kereta cepat di Indonesia dengan melibatkan orang Jepang. Keuntungan yang dapat diperoleh dari Indonesia dari kerjasama dengan Jepang adalah pemanfaatan teknologi negara Jepang yang sudah maju. Indonesia dibantu dengan penerapan teknologi untuk mempercepat laju pembangunan. Jepang membantu Indonesia bangkit dari krisis dan perlahan menuju perbaikan stabilitas ekonomi Indonesia. Berkurangnya pengangguran merupakan salah satu keuntungan pula, karena dengan banyaknya perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia akan semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang diberikan. Seperti perusahaan otomotif Jepang yang membutuhkan tenaga engineering orang Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang di jelaskan dalam latar belakang, maka terdapat pokok permasalahan yang dapat di ambil yaitu : **“Mengapa Indonesia memilih Jepang sebagai mitra kerjasama dalam bidang pertahanan?”**

C. Kerangka Pemikiran

Teori Rational Choice

Rational Choice Sejatinya, tindakan yang dilakukan oleh sebuah negara, tentu saja berdasarkan kepentingan nasionalnya. Namun yang terjadi, transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dengan swasta maupun aktor-aktor lain belum tentu merupakan kepentingan negara itu sendiri. Karena, seringkali dibarengi oleh kepentingan kelompok atau individu tertentu. Maka, untuk melihat fenomena tersebut di atas, teori yang Indonesia gunakan dalam kerjasama pertahanan Indonesia dengan Jepang adalah 'Rational Choice'. Sebagaimana yang telah kita ketahui, hakikat teori rational choice ini adalah memusatkan perhatian pada individu dalam pemerintahan dan pembuatan keputusan pemerintah, yang dimana Indonesia memilih Jepang untuk bekerjasama dalam bidang pertahanan. Teori ini didasarkan pada asumsi nilai dan melakukan penilaian berdasarkan cost and benefit (baik-buruk atau untung ruginya) sebuah kebijakan baru (Mos'ed. 1998:4).

Coleman (1994) memberikan gagasan mengenai teori pilihan rasional bahwa “orang-orang bertindak secara purposif menuju tujuan, dengan tujuan (dan demikian juga tindakan-tindakan) yang dibentuk oleh nilai-nilai atau preferensi”. Dia juga menambahkan bahwa bagi aktor rasional yang berasal dari ekonomi, dalam memilih tindakan-tindakan tersebut seorang aktor akan lebih memaksimalkan utilitas, atau pemenuhan kepuasan kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi pada intinya konsep

yang tepat mengenai pilihan rasional adalah ketika seseorang memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.

Buchanan dan Tullock (1962) menyebutkan dua asumsi kunci teori pilihan rasional: (1) Individu yang rata-rata lebih tertarik untuk memaksimalkan utilitas (kegunaan). Hal ini berarti preferensi individu-nya akan mengarah pada pilihan-pilihan yang dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. (2) Hanya individu yang membuat keputusan, bukan kolektif. Hal tersebut dikenal sebagai metodologis individualisme dan menganggap bahwa keputusan kolektif adalah agregasi dari pilihan individu.

Konsep rational choice berasumsi rasionalitas yaitu bahwa suatu pilihan diambil atas dasar perhitungan atau kalkulasi untung dan rugi (cost and benefit calculation) bukan pada pertimbangan moralitas baik buruk yaitu bagaimana seorang aktor memutuskan sebuah kebijakan dengan memperhitungkan secara rasional. Ketika menjalankan sebuah kebijakan yang berdasarkan dengan konsep Rational Choice ada beberapa hal yang saling berkaitan satu dan lainnya. Tidak dapat melupakan aktor yang terkait yang menjalankannya yaitu *unitary actor*.

Pada penjelasan teori rational choice terdapat tiga poin yang dijelaskan oleh Waltz mengenai teori pilihan rasional. Pertama, teori pilihan rasional bersifat individu yaitu hasil-hasil sosial dan politik dipandang sebagai produk *kolektif* atas pilihan individu (atau sebagai produk dari pilihan yang dibuat oleh aktor kesatuan). Waltz menambahkan mengenai aktor kesatuan (negara) pada aktor teori pilihan rasional, yang sebelumnya dijelaskan oleh Latis yaitu individu. Kedua, Waltz mengasumsikan bahwa aktor berusaha memaksimalkan kepentingannya, hal tersebut dilakukan oleh aktor dengan mengambil suatu pilihan yang akan membawa hasil maksimal terhadap pencapaian kepentingannya. Ketiga, teori pilihan rasional

memfokuskan preferensi dari aktor terhadap kendala tertentu, contohnya aktor memiliki beberapa pilihan. Waltz pada intinya menyatakan bahwa teori pilihan rasional merupakan alat untuk membuat kesimpulan logis tentang bagaimana manusia (atau negara) membuat keputusan. Dari penjelasan mengenai teori pilihan rasional dapat disimpulkan bahwa teori pilihan rasional merupakan instrumen mengenai maksud dan tujuan atau pilihan terarah dari negara untuk mencapai kepentingannya di lingkungan internasional.

Teori Pilihan Rasional merupakan salah satu perangkat akademis yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu keputusan dibuat, untuk mencapai tujuan yang dipandang maksimal. Dalam hal negara, keputusan itu dibuat demi mencapai tujuan atau kepentingan dari negara, baik yang bersifat politis maupun bukan. Dalam *teori* rational choice juga disadari bahwa dunia dalam keadaan yang “anarki”, sehingga, negara belum tentu akan mendapatkan semua keuntungan yang diinginkannya. Oleh sebab itu, pemerintah akan berusaha mencapai kepentingan nasionalnya dalam kerjasama internasionalnya, namun, dalam waktu yang bersamaan juga harus bisa membatasi kepentingan nasionalnya. Selain itu, kerjasama ini juga hanya akan terjadi kalau ada hal yang diberikan dan ada yang diterima berdasarkan kalkulasi cost and benefit. Sehingga, secara tegas dapat dikatakan, sesungguhnya, untuk mencapai kerjasama dalam politik dunia adalah sesuatu yang sangat sulit. Mengingat, di lain pihak, meski negara dianggap memiliki kepentingan nasional yang kuat, sebenarnya, pemerintah tidak dapat mendefinisikan kepentingan nasionalnya dengan secara tepat karena, kepentingan nasional negara akan selalu dibarengi dengan kepentingan para aktor yang terlibat di dalamnya.

Berdasarkan penjelasan James S. Coleman, salah satu sumber yang berperan dalam proses pembuatan kebijakan pada teori pilihan rasional adalah aktor dan

sumber daya. *Dalam* hal ini, aktor berperan dalam menjalankan dan mengendalikan sumber daya terhadap mereka yang mencari sumber daya (Ritzer 2007, 399). Dari pandangan ini dapat dikatakan bahwa kontrol atas sumber daya sangat bergantung pada kemampuan dari aktor yang bersangkutan, berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan yang paling menguntungkan baginya. Dari pandangan inilah kemudian dapat dikatakan bahwa pemerintah merupakan aktor yang membuat keputusan demi tujuan dari negara. Seperti yang dikatakan oleh Brian Fay, bahwa salah satu tugas utama dari ilmu sosial interpretif adalah menemukan niat atau latar belakang aktor dalam melakukan suatu tindakan (Gibbons 2002, 91). Inilah yang secara historis disebut dengan *verstehen*. Maka, untuk dapat menemukan rasionalitas dari suatu tindakan yang dilakukan negara, dilakukan penafsiran terhadap keputusan tersebut, berdasarkan pada kejadian-kejadian yang berkaitan dengan negara yang bersangkutan, teori pilihan rasional ini bermanfaat untuk menerangkan atau mengetahui alasan negara dalam membuat kebijakan-kebijakan politik tertentu.

Kerja sama Indonesia dengan Jepang merupakan kerja sama yang saling menguntungkan. Hal ini dijelaskan pada kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Kunjungan tersebut dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat Januari 2017. Jepang merupakan salah satu mitra strategis terpenting bagi Indonesia di berbagai bidang. Indonesia dan Jepang sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama di bidang politik, ekonomi, maritim, dan sosial budaya. Upaya peningkatan kerja sama tersebut harus selalu disertai prinsip saling menguntungkan.

Jadi, Teori pilihan rasional digunakan pada penelitian ini, untuk menganalisis apa maksud dan tujuan dari kedua negara, dan untuk menjelaskannya, menurut para ahli dalam teori *rational choice*, *cost* dan *benefit* dari pilihan yang dilakukan negara untuk mencapai

kepentingannya dalam hal kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Jepang. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Indonesia menganggap harus ada kerjasama yang jelas dikarenakan pemerintah Indonesia menyadari bahwa banyak komponen penting dalam pertahanan dan keamanan yang dimiliki Indonesia belum cukup dan harus diganti, modernisasi pertahanan dan keamanan yang belum maksimal membuat Indonesia membutuhkan rekan kerja yang siap membantu agar tercapainya keinginan nasional Indonesia dalam bentuk pertahanan, militer, dan tumbuh bersama-sama dengan Jepang yang unggul dalam bidang ekonomi, teknologi, dan kemaritiman.

D. Hipotesis

Dalam menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menarik hipotesa Indonesia memilih Jepang sebagai mitra kerjasama pertahanan karena Jepang memiliki keunggulan dalam bidang pertahanan *kemaritiman*, memiliki kemudahan dalam proses pembiayaan, serta maju dalam bidang ekonomi maupun teknologi.

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang *pada* masalah yang telah dirumuskan diatas. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : “ menjelaskan keuntungan yang di dapatkan Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan Jepang”.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penulisan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan pembahasan, dan juga untuk membantu pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang ditentukan. Lebih jauh lagi, pembatasan dalam sebuah

penelitian dimaksudkan agar objek penelitian lebih jelas dan spesifik, sehingga permasalahan dan kajian tidak keluar dari wacana yang ditetetapkan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membatasi bahasan penelitian pada kajian mengenai pertahanan Indonesia sebelum melakukan kerjasama dengan Jepang. Tidak menutup kemungkinan penulis juga akan mengulas tentang kerjasama pertahanan Indonesia dengan Jepang di era Jokowi.

G. Metode Analisis dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, dalam penelitian ini menggambarkan mengenai Kerjasama Pertahanan Indonesia dengan Jepang era Jokowi. Jenis data yang disajikan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan *data* yang digunakan adalah telaah pustaka (library research), yaitu teknik pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik dari buku - buku, jurnal ilmiah, dokumen dan artikel yang dinilai sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data hasil penelitian adalah teknik kualitatif analisis yang dilandaskan pada kerangka pemikiran konseptual yakni teknik analisis yang dilandaskan pada kerangka pemikiran, dengan menggunakan teori.

H. Sistematika Penulisan

Bab I, akan memaparkan hal-hal yang berkenaan dengan pengantar daripada penelitian ini. Hal-hal tersebut antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, hipotesa, metode penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi penjelasan mengenai problematika sitem pertahan *Indonesia*

Bab III, menjelaskan tentang pilihan - pilihan kerjasama Indonesia dengan negara lain yang memiliki

kesempatan bekerjasama dengan Amerika, Korea Selatan, Rusia, dan China
Bab IV, menjelaskan tentang keuntungan Indonesia dalam *memilih* Jepang sebagai mitra kerjasama pertahanan
Bab V, merupakan kesimpulan